

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Istilah *agency* berasal dari penerapan pendelegasian dalam pengambilan keputusan perusahaan kepada manajemen (agen). Teori keagenan (*agency theory*) yakni korelasi yang muncul dari 1 pihak (*principal*) yang menyewa pihak lainnya (*agent*) guna melaksanakan beberapa jasa, kemudian prinsipal menyerahkan pula hak dan kekuasaan pembikinan keputusan terhadap agen (Supriyono, 2002 dalam Bong, 2021). Akuntabilitas publik adalah pencatatan, pelaporan, dan pencatatan segala kegiatan yang menjadi kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) dan bertanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang berhak memperoleh pertanggungjawaban itu. Pada pemerintahan yang demokratis, korelasi antara pemerintah dan pemakai informasi keuangan pemerintah bisa dilihat sebagai korelasi keagenan. Ada dua macam akuntabilitas publik, yaitu (Listiani, 2018):

- a. Pertanggungjawaban untuk pengelolaan dana terhadap otoritas yang lebih tinggi.
- b. Pertanggungjawaban terhadap rakyat umum.

Zimmerman (1997) menjelaskan, *agency problem* terjadi pula pada organisasi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berperan menjadi agen yang diberikan tanggungjawab oleh masyarakat sebagai *principal* untuk menjalankan tugas pemerintahan. Teori keagenan ialah suatu kesepakatan dari satu atau lebih *principal* dan *agen*. Teori keagenan adalah kesepakatan yang mencakup

pembagian hak dan kewajiban tiap-tiap pihak. Dalam teori keagenan terdapat perbedaan kepentingan antara principal dan agen hingga bisa memunculkan permasalahan kepentingan, guna meminimalisirkan problematika dengan pihak ketiga melalui penggunaan auditor (Artana, 2016).

Dalam kaitannya dengan problem keagenan, praktik pelaporan keuangan pada organisasi sektor masyarakat ialah asas yang didasarkan pada teori keagenan pada pelaporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut berkaitan dengan penelitian ini pemerintah bertindak sebagai agen dengan kewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang bertindak sebagai prinsipal baik secara langsung dan tidak langsung dalam mewujudkan akuntabilitas kepada masyarakat luas. Sehingga teori keagenan dalam praktik teorinya laporan keuangan menjadi sebagian hal yang meminimalisir problem anatara pemerintah dan rakyat.

2.2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

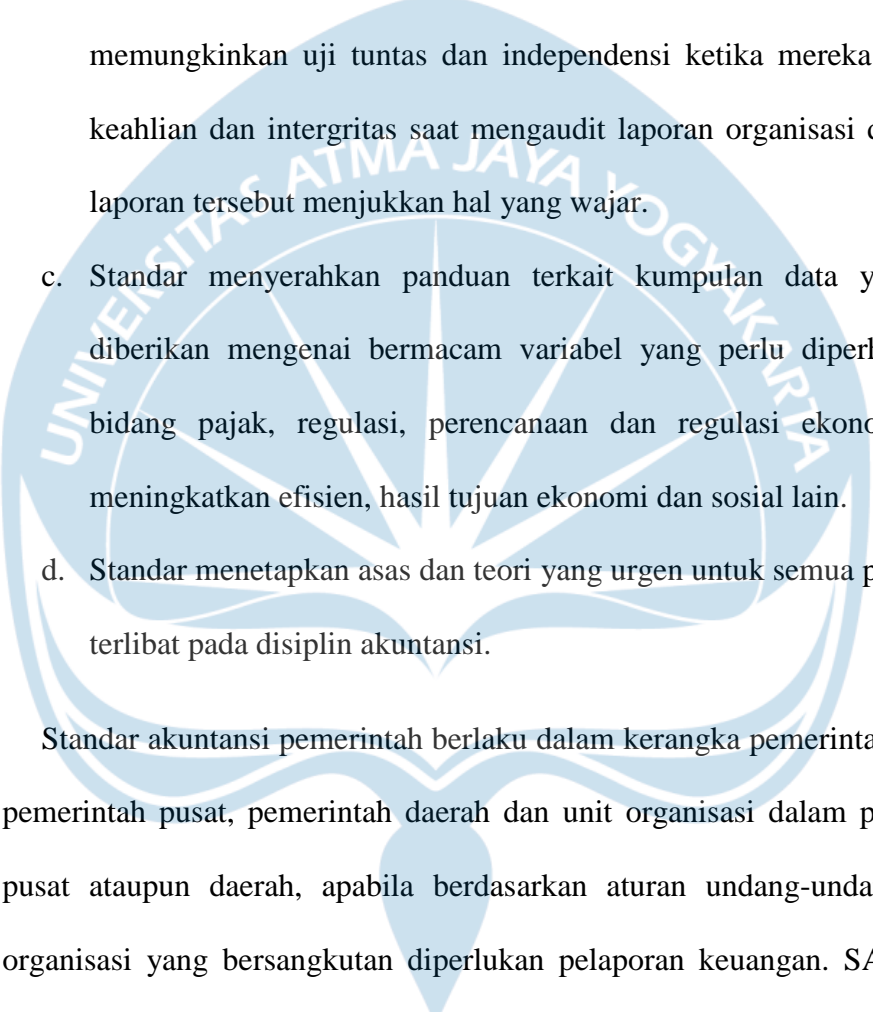
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ialah hasil dari UU No. 71 Th. 2010 dan menjadi asas akuntansi yang berlaku pada penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintah ialah asas akuntansi yang dipakai untuk membuat dan menyediakan akuntansi pemerintah (Bastian, 2010). Oleh karena itu, SAP ialah syarat hukum guna mengembangkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah Indonesia. Guna meningkatkan kualitas LKPD, implementasi standar akuntansi pemerintah wajib ditegakkan secara konsisten. Kualitas laporan keuangan yang semakin meningkat jika pemerintah daerah sepenuhnya berkomitmen untuk

mendapatkan laporan keuangan yang selaras dengan standar akuntansi pemerintah.

Halim (2013:38) menyatakan, bahwa akuntansi pemerintah ialah aktivitas jasa yang menyediakan berita kuantitatif, terkhusus yang memiliki sifat keuangan, kepada entitas pemerintah dalam rangka membuat ketetapan ekonomi secara rasionalitas pihak yang berkepentingan tentang berbagai alternatif tindakan yang direncanakan. Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi yang dipakai guna memberikan berita tentang transaksi keuangan dan ekonomi pemerintah pada lembaga legislatif, yudikatif dan rakyat. Ada wilayah akuntansi pemerintah ialah:

- a. Akuntansi Pemerintah Pusat;
- b. Akuntansi Pemerintah Daerah, antara lain:
 - 1) Akuntansi Pemerintah Provinsi;
 - 2) Akuntansi Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sedangkan Mardiasmo (2009:148) menjelaskan, standar akuntansi adalah dalam penyusunan laporan keuangan untuk pelaporan pada pengguna laporan keuangan, namun prosedur akuntansi adalah praktik khusus yang dipakai untuk menerapkan standar tersebut. Standar akuntansi dibutuhkan untuk memastikan konsisten informasi keuangan. Ketiadaan standar akuntansi yang mencukupi bakal berpengaruh buruk berupa ketidakandalan dan objektivitas informan yang disajikan, inkonsisten laporan keuangan dan kesulitan audit. Dalam penetapan standar akuntansi ada sekian hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- 
- a. Standar ini memberikan panduan terkait berita yang perlu disajikan pada laporan posisi keuangan, kinerja dan hasil kegiatan untuk semua pemakai informasi.
 - b. Standar ini memberi pedoman dan aturan tindakan untuk tim audit yang memungkinkan uji tuntas dan independensi ketika mereka memakai keahlian dan integritas saat mengaudit laporan organisasi dan ketika laporan tersebut menunjukkan hal yang wajar.
 - c. Standar menyerahkan panduan terkait kumpulan data yang akan diberikan mengenai bermacam variabel yang perlu diperhatikan di bidang pajak, regulasi, perencanaan dan regulasi ekonomi, serta meningkatkan efisien, hasil tujuan ekonomi dan sosial lain.
 - d. Standar menetapkan asas dan teori yang urgen untuk semua pihak yang terlibat pada disiplin akuntansi.

Standar akuntansi pemerintah berlaku dalam kerangka pemerintahan yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah dan unit organisasi dalam pemerintah pusat ataupun daerah, apabila berdasarkan aturan undang-undangan unit organisasi yang bersangkutan diperlukan pelaporan keuangan. SAP sendiri didirikan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (Febri S et al., 2019).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) ialah pemakaian asas akuntansi oleh pemerintah saat menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Ada 12 standar akuntansi pemerintahan yang berlaku yakni:

- a. PSAP No. 1 Penyajian Laporan Keuangan

Arah pernyataan ini ialah untuk menyesuaikan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum guna mengembangkan daya banding laporan keuangan pada anggaran, antar periode dan entitas.

b. PSAP No. Laporan Realisasi Anggaran

Arah laporan kinerja anggaran ialah untuk memberi berita tentang kinerja anggaran dan entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan hasil memperlihatkan sejauh mana tujuan yang disepakati antara legislative dan eksekutif telah tercapai sesuai dengan undang-undang.

c. PSAP No. 3 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyediakan berita yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran untuk suatu periode khusus, yang dikelompokkan menurut kegiatan operasi, investasi dalam asset non-keuangan, hibah, dan arus kas serta pos-pos non-anggaran.

d. PSAP No. 4 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Pengungkapan dalam CaLK ialah guna mengembangkan transparansi laporan keuangan dan membantu untuk lebih memahami atas laporan keuangan pemerintah. CaLK disajikan dengan sistematis. Ketika entri pada laporan kinerja anggaran, neraca, dan laporan arus kas wajib dirujuk silang dengan berita yang relevan dalam CaLK.

e. PSAP No. 5 Akuntansi Persediaan

Arah pemaparan ini ialah guna memberikan aturan perlakuan akuntansi persediaan yang dirasa butuh untuk ditampilkan pada laporan keuangan.

f. PSAP No. 6 Akuntansi Investasi

Biaya investasi jangka pendek diyakini sebagai pengeluaran kas oleh Pemerintah dan tak disajikan sebagai beban dalam laporan kinerja anggaran, namun biaya untuk investasi jangka panjang diakui sebagai beban keuangan. Tujuannya untuk mengelola perlakuan akuntansi atas investasi dan pembukaan informasi material lain yang wajib ditunjukkan pada laporan keuangan.

g. PSAP No. 7 Akuntansi Aset Tetap

Arah dari PSAP ini ialah untuk memberikan aturan perlakuan akuntansi asset permanen, termasuk pengakuan, penilaian, pembukan, dan penentuan dan sikap akuntansi untuk penilaian kembali dan penurunan nilai tertulis (*carrying value*) asset permanen.

h. PSAP No. 8 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Arah PSAP ini ialah untuk memberikan aturan pekerjaan akuntansi asset dalam proses penyelesaian.

i. PSAP No. 9 Akuntansi Kewajiban

Arah PSAP ini guna memberikan aturan pengakuan akuntansi liabilitas yang mencakup ketika pengakuan, penetapan nilai tertulis, amortisasi, termasuk biaya pinjaman yang terbebaskan pada liabilitas.

j. PSAP No. 10 Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tak diteruskan.

Arah dari PSAP ini ialah untuk memberikan aturan pengecekan kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, berubahnya kebijakan akuntansi, berubahnya estimasi akuntansi dan operasi yang

tak diteruskan. Jika ingin memperbaiki kesalahan akuntansi perlu menyesuaikan kelebihan anggaran dan saldo modal dan melaporkan koreksi tersebut dengan periode sebelumnya.

k. PSAP NO. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

PSAP ini bertujuan guna memberikan aturan penyusunan laporan keuangan konsolidasian bagi instansi pemerintah untuk menyusun laporan keuangan umum dan membangun kualitas dan lengkapnya laporan keuangan tersebut.

l. PSAP No. 12 Laporan Operasional

Arah dari laporan PSAP ini ialah untuk memberi berita terkait pendapatan, pengeluaran, dan aktivitas operasional keuangan yang tercermin dalam surplus/defisit operasi unit pelaporan LO.

2.3.Sistem Informasi Akuntansi

Berdasarkan Aturan Pemerintah RI No. 56 Tahun 2005, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah kemudian singkatannya yakni SIKD ialah suatu sistem yang mengumpulkan, menadministrasikan, dan mengelola data cara mengelola keuangan daerah dan data yang berhubungan lainnya menjadi berita yang ditampilkan terhadap masyarakat dan sebagai bahan pengambilan ketetapan dalam rangka perencanaan, pengaplikasian, dan pelaporan pertanggung jawaban pemerintah daerah.

Sistem informasi akuntansi ialah sistem informasi yang memegang segala hal yang berhubungan dengan akuntansi. Suatu sistem informasi akuntansi pada organisasi yang bertanggungjawab guna menyiapkan informasi dari

pengumpulan dan pengolahan data transaksional yang bermanfaat untuk seluruh pengguna di dalam dan luar perusahaan. Sistem informasi akuntansi bisa diterjemahkan menjadi kumpulan aktivitas oleh suatu organisasi yang bertanggungjawab guna menyajikan informasi dari data transaksi untuk tujuan pelaporan internal dan eksternal serta untuk penggunaannya bisa lebih efektif, maka sangat perlu untuk mengontrol arus dana kas.

James A. Hall (2007;6) menjelaskan, Sistem ialah sekelompok maupun di atasnya komponen maupun subsistem yang saling berkaitan yang bekerja untuk hal yang selaras. Sistem didefinisikan sebagai komponen-komponen yang bekerja sama untuk sampai pada sebuah tujuan. Subsistem SIA melangsungkan bermacam transaksi keuangan dan non-keuangan yang langsung berpengaruh pada pemrosesan transaksi keuangan (Dasmaran et al., 2018).

Suatu subsistem dikatakan sistem saat menjadi pusat pandangan. Sistem akuntansi informasi ialah serangkaian aturan formal yang mana data dikumpulkan, diubah menjadi informasi dan disebarkan pada pengguna (Hall, 2007;7). Sedangkan sistem informasi akuntansi ialah sebuah sistem pada suatu organisasi yang mengumpulkan keperluan pemrosesan transaksi sehari-hari, mendukung operasi, dan menyajikan pihak eksternal tertentu laporan yang dibutuhkan kegiatan strategis, manajemen organisasi (Jogiyanto, 2005:11).

Penerapan sistem informasi akuntansi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada proses pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan penggunaan sistem informasi akuntansi

keuangan daerah. Berikut faktor pemanfaatan SIA yang dirasakan oleh pengguna dapat diukur sebagai berikut (Rohmah et al., 2020).

- a. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerja pengguna
- b. Pemanfaatan teknologi bisa memunculkan produktivitas pengguna
- c. Pemanfaatan teknologi bisa menaikkan efisiensi proses yang dilakukan pengguna.

Tujuan utama dari dilaksanakannya sistem informasi akuntansi yakni untuk menciptakan pengendalian internal yang dilembagakan untuk budaya manajemen yang baik dan sehat (Marina et al, 2017:33). Sistem informasi akuntansi memiliki tujuan diantaranya:

- a. Menyatukan dan mengamankan data dengan kegiatan dan aktifitas keuangan suatu pemerintah.
- b. Melakukan proses data menjadi berita yang mampu dipakai pada proses penetapan keputusan pemerintah.
- c. Melaksanakan pengendalian terhadap semua bagian pemerintah

Sedangkan (Putri et al., 2020) mengemukakan pendapatnya yakni sistem informasi akuntansi memiliki 3 fungsi utama, diantaranya:

- 1) Terus endukung kegiatan pemerintah
- 2) Membantu proses penetapan keputusan
- 3) Menolong pengelolah pemerintah dalam mentuntaskan tanggung jawab terhadap pihak eksternal

2.4.Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

PP No. 60 Tahun 2008 menerangkan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa : “Sistem Penegendalian Intern ialah proses yang integral pada tindakan dan aktivitas yang dilaksanakan dengan konsisten oleh pemimpin dan semua karyawan guna menyuguhkan rasa yakin cukup atas sampainya pada tujuan organisasi dengan aktivitas yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan pada norma perundang-undangan”. Sistem pengendalian internal pemerintah didasarkan terhadap pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat pada semua operasi, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, dan hanya memberi jaminan penuh, bukan rasa yakin mutlak.

Berlandaskan pada pemikiran itu, telah dikembangkan elemen dari sistem pengendalian internal yang mempunyai kegunaan sebagai petunjuk kinerja dan tolak ukur ungu menguji efektivitas penerapan sistem pengendalian internal. Pengembangan elemen sistem pengendalian intern harus memperhatikan aspek *cost* dan *benefit*, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran kinerja dan perkembangan teknologi informasi serta terlasanakan secara komprehensif.

Alasan atau latar belakang dimunculkannya PP 60 Tahun 2008 terkait SPIP ialah untuk memandu pelaksanaan paket reformasi keuangan Negara menuju *good governance* atau tata pemerintahan yang baik. Unsur sistem pengendali intern pemerintah berdasar terhadap unsur sistem pengendalian intern yang sudah diaplikasikan di wilayah pemerintahan menurut PERMENDARIG no 60 tahun 2008 , meliputi:

1. Lingkungan pengendalian

Pemimpin instansi pemerintah perlu membuat dan menjaga wilayah pengendalian yang menghasilkan sikap positif dan mendorong penerapansistem pengendalian intern di wilayah kerja dengan cara sebagaimana dibawah:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen pada kemampuan
- c. Pemimpinan yang kondusif
- d. Pembuatan susunan organisasi berdasarkan kebutuhan
- e. Perwakilan atau pengutusan wewenang dan tanggungjawab yang benar
- f. Penyusunan dan implementasi kebijakan yang sehat terkait pembinaan SDM
- g. Perwujudan peran perangkat penjagaan intern pemerintah yang tepat guna, setidaknya perwujudan peran perangkat penjagaan intern pemerintah yang efektifsekurang-kurangnya wajib;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instasi Pemerintah terkait.
Hubungan kerja yang baik diwujudkan dengan terdapatnya mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian risiko

Pemimpin instansi pemerintah harus melaksanakan penilaian bahaya. Penilaian bahaya yang dimaksud yaitu identifikasi bahaya dan pengolahan bahaya. Dalam rangka pemberian nilai bahaya sebagaimana yang dimaksud,

pimpinan instansi pemerintah menentukan arah instansi pemerintah dan arah dalam tingkatan aktivitas dengan berdasarkan terhadap aturan perundang-undangan.

3. Aktivitas pengendalian

Pemimpin instansi pemerintah harus mengadakan aktivitas pengendalian berdasarkan dengan ukuran, kelengkapan, dan sifat dari tugas serta gubantasi pemerintah yang berkaitan.

4. Informasi dan komunikasi

Pemimpin instansi pemerintah harus meneliti, menulis, dan melakukan komunikasi berita berupa waktu yang pas. Komunikasi atas berita harus dilaksanakan dengan efektif.

5. Pemantauan dan pengawasan pengendalian internal

Pemimpin instansi pemerintah harus melaksanakan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pengecekan Sistem Pengendalian Intern akan dilakukan dengan perantara pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review yang lain.

Sistem pengendalian internal ditentukan oleh susunan organisasi, metode dan ukuran yang disesuaikan demi melindungi kemampuan organisasi dalam memverifikasi keakuratan dan bisa diandalkannya data akuntansi, efisiensi, dan kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian internal menekankan pada tujuan yang ingin diraih, bukan elemen dari pengertian pengendalian intern diatas karena merupakan sistem ini bekerja dengan baik untuk perusahaan yang

menggunakan mesin akuntansi untuk memproses informasi secara manual bukan hanya memanfaatkan computer (Rohmah et al., 2020).

2.5. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan sektor masyarakat adalah salah satu faktor utama dalam membangun akuntabilitas sektor publik. Meningkatkan persyaratan pelaksanaan akuntabilitas publik mempengaruhi pemerintah untuk menyediakan informasi termasuk informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan. Akuntansi sektor masyarakat memiliki peranan penting pada penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Agar dapat dipertanggungjawabkan keuangan yang disebarkan juga wajib berkualitas.

Kualitas laporan keuangan ialah ukuran-ukuran normatif yang harus dipenuhi pada informasi akuntansi hingga bisa mencapai tujuan (SAP, 2011:35). Karena pelaporan keuangan merupakan landasan pengambilan keputusan, maka laporan keuangan tahunan pemerintah daerah perlu disediakan dengan cepat dan andal. Lebih dari itu, laporan keuangan juga mencakupi pengungkapan informasi yang tepat yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Sesuai Aturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terkait SAP menerangkan 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan persyaratan normatif laporan keuangan pemerintah memiliki kualitas yang diinginkan, yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan dapat disebut relevan bila informasi yang terkandung bisa berpengaruh pada ketetapan pemakai dengan membantu mereka melakukan penilaian kejadian lampau atau sekarang, dan mentaksirkan masa depan, juga menegaskan atau mengecek hasil penilaian mereka pada masa lampau. Informasi yang sesuai akan bercirikan karakter seperti dibawah ini:

a. Mempunyai kegunaan umpan balik (*feedback value*)

Berita yang memungkinkan bagi pengguna guna menegaskan atau mengoreksi.

b. Mempunyai kegunaan prediktif (*predictive value*)

Informasi memberikan bantuan pemakai mengira-ngira masa depan berlandaskan hasil dari peristiwa lampau dan masa sekarang.

c. Tepat waktu

Informasi yang disediakan pada waktu yang tepat dan bisa mempengaruhi dan membantu penetapan keputusan.

d. Lengkap.

Infomasi akuntansi keuangan pemerintah disediakan dengan lengkap, termasuk seluruh berita akuntansi yang bisa berpengaruh pada penetapan keputusan. Informasi dibalik semua berita penting dalam laporan keuangan diungkapkan

dengan jelas untuk menghindari kesalahan pada pemakaian informasi.

2. Andal

Informasi pada laporan keuangan bebas dari penjelasan yang tidak benar dan kesalahan material, menyediakan semua kenyataan dengan jujur, dan bisa diverifikasi. Informasi bisa ditanggungkan maka pemakai informasi itu secara potensial bisa menyebabkan sesat. Informasi yang handal memenuhi ciri-ciri antara lain:

a. Penyajian Jujur

Informasi mendeskripsikan dengan jujur transaksi juga kejadian lain yang semestinya ditampilkan atau yang secara normal bisa diharap ditunjukkan.

b. Bisa Diverifikasi (Verifiability)

Informasi yang disajikan berbentuk laporan keuangan bisa diuji, dan jika pemberian uji dilaksanakan diatas satu kali oleh pihak yang tidak sama, hasilnya permanen menunjukkan kesimpulan yang tak jauh berbeda.

c. Netralitas

Informasi diorientasikan pada keperluan umum dan tak berpihak pada kebutuhan khusus.

3. Bisa dibandingkan

Informasi yang dimuat pada laporan keuangan bakal kian bermanfaat apabila bisa dibanding dengan laporan keuangan masa

yang lalu atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada biasanya. Perbandingan mampu dilaksanakan dengan internal dan eksternal. Perbandingan internal bisa dilaksanakan apabila sebuah entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang tidak berbeda setiap tahunnya. Perbandingan secara eksternal mampu dilaksanakan jika suatu entitas yang dibandingkan mengimplementasikan ketetapan akuntansi yang tidak berbeda. Jika entitas pemerintah bakal melaksanakan ketetapan akuntansi yang lebih baik dibandingkan ketetapan akuntansi yang saat ini diaplikasikan, perubahan itu dipaparkan saat masa terjadinya perubahan.

4. Bisa Dimengerti

Informasi yang ditampilkan pada laporan keuangan bisa dimengerti oleh pemakai dan dijelaskan dengan bentuk atau istilah yang diselaraskan dengan batas pengertian para pemakai. Oleh sebab itu, pemakai dikatakan mempunyai pemahaman yang cukup atas aktivitas dan lingkungan operasi entitas pelaporan, juga terdapatnya kehendak pemakai guna memepelajari informasi yang dimaksud.

Namun menurut karakteristik kualitatif laporan keuangan bisa diklasifikasikan, antar lain:

- a. Kualitas tertinggi (bisa dimengerti dan bermanfaat)
- b. Kualitas primer; sesuai (nilai prediksi, nilai umpan balik, tepat waktu, andal (daya uji, netral, tepat saji)

- c. Kualitas sekunder; konsisten, komparatif
- d. Problem; materialitas, konservatif, biaya manfaat

2.6. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Ikhtisar Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun) dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hadi Jauhari, dkk (2021): Pengaruh Sistem Akuntansi Keunagan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Kuantitatif	Variabel Independen: Standar Akuntansi Pemerintah, Standar Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berimbas positif signifikan pada kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan sistem pengendalian intern pemerintah tak memoderasi pengaruh antara penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah pada kualitas laporan keuangan daerah
2.	Lailatur Rohmah, dkk (2020): Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem	Kuantitatif	Variabel Independen: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intenal	Pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal secara simultan dan parsial berpengaruh positif signifikan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Malang.

	Pengendalian Internal Paada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang		Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	
3.	Verliani Dasmaran, dkk. (2018): Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Pada Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pandeglang	Kuantitatif	Variabel Independen: Sistem Akuntansi Pemerintah Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Standar Akuntansi Pemerintah secara parsial berpengaruh positif signifikan pada kualitas laporan keuangan daerah
4.	Nurhasanah, dkk. (2018): Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Kuantitatif	Variabel Independen: Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan sumber daya manusi secara simultan berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Secara parsial standar akuntansi pemerintahan dan sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan pada kualitas laporan keuangan. Namun sistem pengendalian internal secara parsial tidak

	Provinsi Sumatra Selatan			berpengaruh pada kualitas laporan keuangan
5.	Nih Luh Wayan Tiya Lestari, dkk. (2020): Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Kuantitatif	Variabel Independen: Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan pada kualitas Laporan Keuangan

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Keharusan transparansi dan akuntabilitas didalam proses kelola keuangan daerah sudah menarik perhatian masyarakat dan guna mencukupi keharusan itu, pemerintah perlu memberikan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Laporan keuangan berbentuk laporan keuangan dan perlu disusun menurut SAP agar memperoleh laporan keuangan yang berkualitas (Sihasale & Setiyowati, 2018).

Penerapan SAP digunakan sebagai pedoman pelaporan transaksi yang terjadi dalam kegiatan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, ditunjukkan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang berbasis SAP. Informasi LKPD sangat bermanfaat karena dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan dan sebagai akses informasi bagi pihak yang berkepentingan.

Standar Akuntansi Pemerintah ialah asas akuntansi yang ditentukan dalam kesiapan dan pertunjukan pembukuan pemerintah. Tujuan dari penerapan ini adalah supaya laporan keuangan yang diproduksi bisa menaikkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Penerapan SAP yang baik memberikan informasi yang berkualitas kepada pemerintah daerah dalam bentuk laporan keuangan bagi pemerintah daerahnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berisi alur proses yang jelas untuk menyiapkan laporan keuangan untuk pemerintah daerah. Maka dari itu, amat penting untuk semua aparatur dalam memahami SAP, sehingga bisa memudahkan dalam mengimplementasikan SAP saat membuat laporan keuangan yang berkualitas baik (Khairudin, 2017).

Penelitian penerapan standar akuntansi keuangan pemerintah pada kualitas laporan keuangan didukung penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Jauhari, dkk. (2021), Rohmah, dkk. (2020), Dasmaran, dkk. (2018), Nurhasanah, dkk. (2018) yang menerangkan bahwa penerapan

standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan.

H1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh secara positif bagi kualitas laporan keuangan

2.7.2. Pengaruh sistem informasi akuntansi pada kualitas laporan keuangan

Kemajuan inovasi data yang selalu maju akan membuat banyak warga berubah. Salah satunya bekerja pada sebuah instansi pemerintah yang telah menggunakan teknologi informasi untuk mendukung kegiatannya (Sihasale & Setiyowati, 2018). Semakin baik dalam pemahaman penggunaan sistem informasi akuntansi, maka kualitas laporan yang diperoleh bakal kian berkembang.

Seiring adanya kemajuan teknologi informasi sekarang tak cuma digunakan pada organisasi dalam kegiatan berbisnis, namun juga dapat dimanfaatkan pada suatu organisasi sektor publik, termasuk dalam pemerintahan. Berdasarkan dengan PP Nomor 56 Tahun 2005, mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah yang kemudian disingkat dengan SIKD ialah sebuah sistem yang menyimpan dokumen, menadministrasikan, dan menangani informasi administrasi moneter lokal dan informasi terkait lainnya ke dalam data yang diperkenalkan ke daerah setempat dan sebagai bahan dinamis dalam sistem pengaturan, pelaksanaan, dan mengumumkan tanggung jawab pemerintah lingkungan.

Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk melakukan proses informasi yang lekas dan akurat untuk memperoleh laporan

keuangan yang baik yaitu dengan meningkatkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi sistem informasi akuntansi. Kian baik aparatur memakai sistem informasi akuntansi, maka kualitas laporan keuangan yang diperoleh bakal kian baik dan berkembang. Kertekaitan antara kualitas laporan keuangan dan kualitas sistem informasi akuntansi mempunyai kesinambungan karena didalam tujuan sistem informasi akuntansi salah satunya untuk meningkatkan kualitas informasi dalam bentuk laporan keuangan.

Adapun dalam bidang akuntansi hubungan sistem informasi akuntansi dengan kualitas laporan keuangan, sistem sering disebut dengan Sistem Informasi Akuntansi (SIA), dari bentuk yang sederhana hingga canggih sistem informasi akuntansi, umumnya membantu pengguna dalam mengumpulkan data keuangan, mengubahnya menjadi suatu informasi yang berguna untuk penggunaannya dan membuat laporan keuangan dengan kualitas baik.

Penelitian sistem informasi akuntansi pada kualitas laporan keuangan sudah dilaksanakan oleh penelitian sebelumnya Rohmah, dkk. (2020), Lestari, dkk. (2020) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan.

H2 : Sistem informasi akuntansi berpengaruh secara positif pada kualitas laporan keuangan.

2.7.3. Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah pada kualitas laporan keuangan

Pengendalian internal adalah cara guna mengelola, mengevaluasi, dan mengukur sumber daya organisasi dan memainkan peran urgen guna mencegah dan mendeteksi penggelapan dan penipuan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah bertujuan guna mencapai tujuan pengelolaan Negara, keandalan pelaporan keuangan, keamanan asset Negara dan kepatuhan pada peraturan dalam perundang-undangan (PP No. 60 tahun 2008). Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang baik diperlukan SPIP yang memadai.

Sistem pengendalian internal ialah persyaratan bagi pengelolaan pemerintah dan pengelolaan keuangan yang handal. Suatu organisasi dapat bekerja dengan baik apabila sistem pengendalian internal juga baik. SPIP merupakan bentuk pengawasan pemerintah untuk mengelolah keuangan pemerintah secara transparan. SPIP memantau penggunaan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan dan efisiensi aktivitas, pelaporan keuangan yang andal, menghapus tindakan kecurangan serta kerugian yang signifikan.

Selain itu, penerapan SPIP yang efektif bisa menghindari kesalahan dalam pembuatan LKPD. Dalam erat kaitannya SPIP yang efektif dapat meningkatkan kualitas dari informasi laporan keuangan guna memperoleh laporan keuangan yang berkualitas baik. SPIP bertujuan untuk menciptakan laporan keuangan yang akurat, relevan dan andal serta mendorong aktivitas

efisiensi dan efektif. Oleh karena itu, SPIP menetapkan arahan guna mencapai LKPD menurut prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

Berlandaskan penelitian sebelumnya yang sudah dilaksanakan Rohmah, dkk. (2020), Nurhasanah, dkk. (2018), Lestari, dkk. (2020) sistem pengendalian internal berpengaruh positif bagi kualitas laporan keuangan.

H3 : Sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif pada kualitas laporan keuangan.

2.8. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka, serta pengembangan hipotesis diatas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan seperti dibawah ini:

